

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK ARAB SAUDI DAN IRAN

Rivalitas antara Arab Saudi dan Iran tak muncul begitu saja dalam ruang hampa, melainkan terbentuk oleh sejarah panjang sejak keduanya menjadi negara modern. Pernah menjalin hubungan yang cukup harmonis, sejak revolusi Iran pada 1979, praktis hubungan keduanya cenderung diwarnai oleh berbagai konflik dan ketegangan. Sebagai dua negara yang memegang peranan kunci di Timur Tengah, keduanya saling berebut pengaruh untuk menjadi negara hegemon yang mengendalikan negara-negara kecil di kawasan.

Meski nyaris tak pernah terlibat dalam pertempuran militer secara langsung, tapi keduanya banyak bertrok kepentingan di berbagai negara yang tengah berkonflik. Untuk memahami kondisi mutakhir rivalitas dua negara berpengaruh ini, penting untuk melacak kembali riwayat hubungan keduanya. Catatan riwayat hubungan keduanya penting untuk memberikan gambaran secara utuh sehingga bisa didapatkan konteks yang tepat. Sebelum membahas lebih jauh tentang dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran, penting untuk terlebih dulu disajikan gambaran tentang profil kedua negara.

A. Profil Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara berpenduduk mayoritas muslim yang terletak di semenanjung arab dengan bentuk pemerintahan monarki absolut. Arab Saudi terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT, berbatasan dengan Yordania dan Irak di utara, Kuwait di timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di timur, Oman di tenggara, dan Yaman di selatan. Luas

kawasannya adalah 2.240.000 km².¹ Arab Saudi merangkumi empat perlima kawasan di [Semenanjung Arab](#) dan merupakan negara terbesar di [Asia Timur Tengah](#). Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan [gurun](#). Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki "Daerah Kosong" (dalam [bahasa Arab](#), *Rub al Khali*), kawasan gurun terluas di dunia. Namun di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi terdapat sangat banyak wadi. Beberapa daerah subur dapat ditemukan dalam endapan aluvial di wadi, basin dan oasis.

Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran [Nabi Muhammad](#) serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada Tuhan selain [Allah](#) dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya".

Pada tanggal 23 September 1932 Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Sa'udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Sa'ud.

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum [Syariat](#) Islam dengan berdasar pada pengamalan ajaran Islam berdasarkan pemahaman salafush shalih (para sahabat Nabi dan yang mengikuti mereka dengan baik) dan secara umum bermazhab Hambali. pemahaman ini sebagai pemahaman sahabat Nabi terhadap Al Qur'an dan Hadits, sehingga sering menyebutnya sebagai pemahaman Salafi. Memiliki hubungan

¹ http://www.saudiembassy.net/about/country-information/facts_and_figures/

internasional dengan negara-negara lain baik negara-negara Arab, negara-negara anggota [Organisasi Konferensi Islam](#), maupun negara-negara lain.

Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan Petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber-sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air Laut di kota [Jubail](#). Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota suci [Mekkah](#) dan [Madinah](#) adalah Kota [Riyadh](#) sebagai ibukota kerajaan, [Dammam](#), [Dhahran](#), [Khafji](#), [Jubail](#), [Tabuk](#) dan [Jeddah](#).

Sebagai negara yang berpengaruh di kawasan, sumber kekuatan utama Saudi diperoleh dari pendapatan mereka atas minyak. Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak ini juga menjadi sumber pembentuk kekuatan dan pengaruh keluarga Kerajaan Saudi, baik di dalam maupun luar negeri.

Wilayah kekuasaan Kerajaan Saudi dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara [Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus](#) dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Pada masa-masa awal berdirinya, Kerajaan Saudi adalah salah satu negara termiskin di dunia, bergantung pada pendapatan pertanian dan haji yang terbatas. Namun, kondisi tersebut mulai berubah ketika pada tahun 1938 ditemukan cadangan minyak yang besar di wilayah Al-Ahsa, sepanjang pantai Teluk Persia, dan eksplorasi mulai dilakukan pada tahun 1941 di bawah

Aramco US-dikendalikan (Arabian American oil Company). Minyak menghujani Arab Saudi dengan kemakmuran ekonomi dan pengaruh politik yang besar secara internasional. Kehidupan budaya berkembang pesat, terutama di Hijaz, yang merupakan pusat untuk surat kabar dan radio. Namun, masuknya besar pekerja asing di Arab Saudi dalam industri minyak meningkatkan kecenderungan yang untuk xenophobia. Pada saat yang sama, pemerintah menjadi semakin boros dan mewah. Pada tahun 1950 telah menyebabkan defisit besar pada anggaran belanja pemerintah dan menghadirkan pinjaman luar negeri yang berlebihan.

Pada tahun 1973, Arab Saudi memimpin boikot minyak terhadap negara-negara Barat yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur melawan Mesir dan Suriah. Harga minyak meningkat empat kali lipat. Pada tahun 1975, Faisal dibunuh oleh keponakannya, Pangeran Faisal bin Musaid dan digantikan oleh saudara tirinya Raja Khalid. Saudi wilayah administratif Arab dan jalan raya peta.

Pada tahun 1976, Arab Saudi telah menjadi produsen minyak terbesar di dunia pemerintahan Khalid melihat kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial pada tingkat yang sangat cepat, mengubah infrastruktur dan sistem pendidikan negara;. Dalam hal kebijakan luar negeri, Pemerintah Riyadh mulai membangun hubungan dekat dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 1979, terjadi dua peristiwa penting yang mengundang perhatian dan memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kebijakan luar negeri dan dalam negeri Saudi. Yang pertama adalah Revolusi Islam Iran. Dikhawatirkan bahwa Revolusi Iran akan memicu minoritas Syiah di negara itu yang terkonsentrasi di Provinsi Timur (yang juga merupakan lokasi dari ladang minyak) untuk melancarkan pemberontakan di bawah pengaruh Iran yang sealiran dengan

mereka. Memang sempat ada beberapa pemberontakan anti-pemerintah di wilayah tersebut seperti pemberontakan Qatif pada 1979.

Peristiwa kedua adalah pendudukan masjidil haram di Mekah oleh ekstremis Islam. Para ekstremis tersebut kecewa terhadap pemerintah yang mereka anggap banyak melakukan korupsi dan mulai berperilaku tak islami. Pemerintah kembali menguasai masjid setelah 10 hari. Mereka yang ditangkap kemudian dieksekusi.

Merespon peristiwa ini, keluarga kerajaan mengeluarkan beberapa kebijakan baru untuk menegakkan ketaatan lebih ketat dari norma-norma agama dan sosial tradisional di negara tersebut (misalnya, penutupan bioskop) dan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada para ulama dalam pemerintahan.

Di masa pemerintahan Raja Fahd, Saudi terus mengembangkan hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan meningkatkan pembelian peralatan militer Amerika dan Inggris. Kekayaan besar yang dihasilkan oleh pendapatan minyak mulai memiliki dampak yang lebih besar pada masyarakat Saudi. Ini menyebabkan modernisasi di bidang teknologi, urbanisasi, pendidikan umum massal dan penciptaan media baru. Meskipun ada perubahan dramatis dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara, kekuasaan politik terus dimonopoli oleh keluarga kerajaan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang Saudi yang mulai mengharapkan pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas dalam pemerintahan.²

Pada 1980-an, Arab Saudi menghabiskan \$ 25 miliar untuk mendukung Saddam Hussein dalam Perang Iran-Irak. Namun, Arab Saudi mengutuk invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 dan meminta AS untuk campur tangan. Raja Fahd mengizinkan Amerika dan pasukan koalisi

² Joy Winkie Viola (1986). *Human Resources Development in Saudi Arabia: Multinationals and Saudization*. hal. 37

mendirikan pangkalan militer di negaranya. Dia mengundang pemerintah Kuwait dan banyak warganya untuk tinggal di Arab Saudi, tapi diusir warga Yaman dan Yordania karena dukungan pemerintah mereka ke Irak.³ Pada tahun 1991, pasukan Arab Saudi diduga terlibat dalam aksi serangan bom di Irak dan invasi darat untuk membantu membebaskan Kuwait.

Hubungan Arab Saudi dengan Barat mulai menimbulkan kekhawatiran dikalangan sebagian ulama dan mahasiswa, dan memunculkan sikap anti-Barat. Hal ini, sampai batas tertentu menyebabkan peningkatan terorisme Islam di Arab Saudi, serta serangan teroris Islam di negara-negara Barat oleh orang Arab. Osama bin Laden adalah seorang warga Saudi (sampai dilucuti kewarganegaraannya pada tahun 1994). 15 dari 19 pembajak yang terlibat dalam serangan 9/11 di New York, Washington dan Virginia adalah warga negara Saudi.

Islamisme dan anti-barat bukan satu-satunya sumber ketidakpuasan warga kepada pemerintah. Meskipun sekarang sangat kaya, pertumbuhan ekonomi Arab Saudi relatif stagnan. Pajak yang tinggi dan angka pengangguran dalam skala besar telah berkontribusi melahirkan ketidakpuasan. Hal ini telah tercermin dalam kenaikan kerusuhan sipil, dan ketidakpuasan dengan keluarga kerajaan.

Pada tahun 2005, Raja Fahd meninggal dan digantikan oleh Abdullah. Sebagai Raja baru, Abdullah memperkenalkan sejumlah paket reformasi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada pendapatan minyak. Paket tersebut tercermin dalam tiga kebijakan utama: deregulasi terbatas, dorongan investasi asing, dan privatisasi.

Pada bulan Februari 2009, Abdullah mengumumkan serangkaian perubahan kebijakan pemerintah untuk peradilan, angkatan bersenjata, dan berbagai kementerian. Pada tanggal 29

Januari 2011 ratusan demonstran berkumpul di kota Jeddah, kritik terhadap infrastruktur miskin kota setelah banjir yang mematikan menyapu kota, menewaskan sebelas orang. Polisi menghentikan demonstrasi setelah sekitar 15 menit dan ditangkap 30 sampai 50 orang.⁴

Sejak 2011, Arab Saudi telah dipengaruhi oleh protes Muslim Semi Arab sendiri. Sebagai tanggapan, Raja Abdullah mengumumkan pada 22 Februari 2011 serangkaian kebijakan insentif bagi warga sebesar \$ 36.000.000.000, dari yang \$ 10.700.000.000 dialokasikan untuk perumahan. Beberapa tahanan didakwa atas kejahatan keuangan diampuni. Pada tanggal 18 Maret tahun yang sama, Raja Abdullah mengumumkan paket \$ 93.000.000.000, termasuk 500.000 rumah baru, dan pembukaan 60.000 lapangan pekerjaan baru.⁵

Dalam hal politik, pemilihan kota diadakan pada tanggal 29 September 2011, meskipun hak pilih hanya untuk laki-laki. Baru pada 2015, perempuan memperoleh hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kota, dan juga untuk dicalonkan sebagai Dewan Syura.⁶

1. Sistem Politik Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara monarki absolut. Undang-Undang Dasar Arab Saudi diadopsi dari dekrit Raja pada tahun 1992, dimana Raja harus tunduk kepada hukum Syariat dan Quran, sedangkan Quran dan Sunnah diposisikan sebagai konstitusi negara. Sistem politik Arab Saudi tidak mengenal partai politik atau pemilihan umum nasional. Kondisi ini memunculkan banyak kritik yang menganggapnya sebagai kediktatoran totaliter. The Economist menempatkan pemerintah Saudi pada urutan kelima negara yang paling otoriter dari 167 negara yang dinilai

⁴ Anthony H. Cordesman (2009). *Saudi Arabia: National Security in a Troubled Region*. hal. 50–52.

⁵ "[Saudi ruler offers \\$36bn to stave off uprising amid warning oil price could double](#)". *The Daily Telegraph* (London).

⁶ Donna Abu (18 March 2011). "[Saudi King to Spend \\$67 Billion on Housing, Jobs in Bid to Pacify Citizens](#)" <http://www.bloomberg.com/news/2011-03-18/saudi-arabian-king-abdullah-boosts-spending-as-protests-sweep-arab-world.html>. Diakses pada 2 April 2016

pada 2012, sementara itu Freedom House memberikan rating terendah "Tidak Bebas", 7.0 ("1 = terbaik, 7 = terburuk") pada 2013.

Dengan tidak adanya pemilu nasional dan partai politik, politik di Arab Saudi berlangsung di dua arena yang berbeda: di internal keluarga kerajaan, keluarga Al Saud, dan antara keluarga kerajaan dengan sisanya dari masyarakat secara luas. Di luar keluarga Al-Saud, partisipasi dalam proses politik sangat terbatas pada segmen yang relatif kecil.

Dalam sistem pemerintahan Saudi, Raja merupakan pemegang otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus. Raja juga merangkap sebagai perdana menteri, dan memimpin Dewan Menteri (Majlis al-Wuzarā'), yang terdiri dari wakil perdana menteri dan menteri-menteri lainnya.

Keluarga kerajaan mendominasi sistem politik. sejumlah besar keluarga memungkinkan untuk mengontrol sebagian besar posisi penting di kerajaan dan memiliki peran dan kewenangan di semua tingkat pemerintahan. Jumlah pangeran diperkirakan sedikitnya 7.000, dengan kekuasaan dan pengaruh yang paling sebanyak 200 orang keturunan laki-laki dari Ibn Saud. Kementerian-kementerian strategis umumnya disediakan untuk keluarga kerajaan, sebagaimana posisi gubernur di tiga belas daerah yang strategis.

Keluarga kerajaan secara politis dapat dibagi kedalam beberapa faksi berdasarkan klan, ambisi pribadi dan perbedaan ideologi. Faksi klan yang paling kuat dikenal sebagai 'Sudairi Seven', yang terdiri dari almarhum Raja Fahd dan saudara kandung serta keturunan mereka. Pada sisi ideologis mencakup perbedaan sikap dalam memandang isu-isu seputar reformasi, dan apakah peran ulama harus ditingkatkan atau dikurangi.

Dalam indeks persepsi korupsi internasional yang dikeluarkan pada tahun 2010, Arab Saudi mendapatkan skor 4,7 (pada skala dari 0 sampai 10 di mana 0 adalah "sangat korup" dan 10

adalah "sangat bersih").⁷ Arab Saudi telah mengalami proses reformasi politik dan sosial, seperti untuk meningkatkan transparansi publik dan tata pemerintahan yang baik. Namun, nepotisme dan patronase masih tinggi di negara tersebut. Selain itu, penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi juga masih terbang pilih.

Telah ada tekanan untuk mereformasi dan memodernisasi aturan keluarga kerajaan, agenda yang diperjuangkan oleh Raja Abdullah. Penciptaan Dewan Konsultatif di awal 1990-an tidak memenuhi tuntutan partisipasi politik, dan, di 2003, Forum Dialog nasional tahunan diumumkan bahwa akan memungkinkan para profesional dan intelektual yang dipilih untuk debat publik isu-isu nasional saat ini. Pada tahun 2005, pemilu kota pertama diadakan. Pada tahun 2007, Dewan Kesetiaan diciptakan untuk mengatur suksesi. Pada tahun 2009, raja membuat perubahan personel yang signifikan kepada pemerintah dengan menunjuk mereka yang dianggap reformis untuk menduduki posisi kunci dan penunjukan perempuan sebagai menteri untuk pertama kalinya. Namun, perubahan telah dikritik karena terlalu lambat atau hanya pencitraan.

Dalam sistem politik dan pemerintahan Saudi, ulama memiliki posisi dan peran strategis dalam sistem politik kerajaan Saudi. Para ulama memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, misalnya pengenaan embargo minyak pada tahun 1973 dan undangan untuk pasukan asing ke Arab Saudi pada tahun 1990. Selain itu, mereka memiliki peran utama dalam sistem peradilan dan pendidikan dan monopoli kekuasaan di bidang moral keagamaan dan sosial.

Secara historis, posisi sentral ini berpangkal dari Syeikh Al Ash, seorang ulama terkemuka di negara itu. Al ash adalah keturunan dari Muhammad ibn Abd al-Wahhab, pendiri

⁷ *Library of Congress, Federal Research Division (2006). "Country Profile: Saudi Arabia". http://memory.loc.gov/frd/cs/profiles/Saudi_Arabia.pdf. Diakses pada 2 April 2016*

gerakan Wahhabi, salah satu aliran dalam faham Sunni yang sekarang dominan di Arab Saudi. Keluarga Ibn Wahhab adalah keluarga terkemuka di Saudi di luar keluarga Al Saud (keluarga kerajaan). Dua kekuatan ini kemudian membentuk kesepakatan untuk saling mendukung. Kesepakatan inilah yang mengawali pertalian antara Kerajaan Saudi dengan Wahhabi, kesepakatan yang berlanjut sampai hari ini.

B. Profil Iran

Iran adalah negara berbentuk republik islam yang terletak di Asia Barat Daya. Wilayah geografis Iran berbatasan dengan Pakistan (dengan garis perbatasan sepanjang 909 km), dan Afghanistan (936 km) di timur, Teluk Persia, dan Teluk Oman di selatan, Turki (499 km) dan Irak (1.458 km) di barat, Azerbaijan (432 km), dan Armenia (35 km) di barat laut, Laut Kaspia di utara, dan Turkmenistan (992 km) di timur laut. Penduduk Iran tercatat sebanyak 78.511.100 jiwa dengan komposisi 51 % etnis persia, Azerbaijan (24%), Gilaki dan Mazandaran (8%), Kurdi (7%), Arab (3%), Baluchi (2%) Lur (2%) Turkmen (2%), dan juga suku-suku lain (1%). Jumlah tersebut tersebar di tiga puluh provinsi yang mempunyai total luas tanah 1.648.000 km², terdiri dari 1.636.000 km² daratan, dan 12.000 km² wilayah perairan.

Sebagian besar populasi Iran tersebar di bagian barat negara yang berlanskap dataran tinggi dengan barisan pegunungan seperti Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros, dan Alborz, yang terakhir merupakan tempat titik tertinggi Iran, Gunung Damavand pada 5.604 m. Sebelah timur yang didominasi gurun di dataran rendah seperti Dasht-e Kavir yang asin, dengan danau garam yang kadang muncul, relatif tak berpenghuni. Iklim Iran kebanyakan kering atau setengah kering, meskipun ada yang subtropis sepanjang pesisir Kaspia.

Iran mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk di kawasan kota tertinggi di dunia. Dari tahun 1950 hingga tahun 2002, persentase penduduk kota meningkat dari 27% ke 60%. PBB memperkirakan pada tahun 2030, populasi di kota akan mencapai 80% dari jumlah keseluruhan penduduk Iran. Tumpuan migrasi dalam negeri pula ialah Teheran yang merupakan kota terbesar di Iran. Teheran mempunyai penduduk sebanyak 7.160.094, dan kawasan metropolisnya pula sebanyak 14 juta.

Sebagian besar penduduk Iran beragama Islam, terdiri dari mereka yang berfaham Syiah sebanyak 90% sementara ajaran Sunni dianut oleh 8% penduduk yang kebanyakan dari kaum Kurdi, Turkmen, dan Balochi. Semenjak Dinasti Safawiyah, Iran dikenal sebagai benteng utama dari ajaran Syi'ah. Hal ini membuat Iran satu dari lima negara yang penduduk Muslim mayoritasnya mengikuti ajaran Syi'ah (empat lainnya adalah Azerbaijan, Bahrain, dan Irak (mayoritas absolut), beserta Lebanon (mayoritas pluralisme)) serta negara dengan jumlah penganut Syi'ah terbanyak di dunia. 2% lagi adalah penganut agama Baha'i, Mandean, Hindu, Zoroastrianisme, Yahudi, dan Kristen. Kendati sebagai negara Islam yang teokratis, tidak seperti negara lain di Timur Tengah, toleransi umat beragama termasuk tinggi di Iran; komunitas Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme yang telah hidup selama ribuan tahun

Dari sisi budaya, Iran merupakan negara dengan peradaban yang cukup tua. Negara yang beribu kota di Teheran ini juga dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang membentuk apa yang disebut sebagai tempat lahirnya kebudayaan manusia.

Kebudayaan Iran telah lama mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan lain di Timur Tengah dan Asia Tengah. Pada masa pra-Islam, Iran adalah salah satu kekaisaran terkuat di dunia karena prestasinya menguasai wilayah dari Asia Selatan melewati Timur Tengah hingga

penjuru Balkan di Eropa dan Mesir. Bahasa Persia, salah satu bahasa tertua di dunia, berdampak kuat pada perkembangan bahasa Armenia, sementara pemerintahan Koresh yang Agung dicirikan dengan adanya prasasti pertama tentang hak asasi manusia beserta pemulangan Bani Israil dari Mesopotamia kembali ke Palestina yang membuatnya dianugerahkan gelar Mesias dan mempengaruhi perkembangan Alkitab Ibrani. Setelah Islam diperkenalkan, bahasa Persia bukannya lenyap seperti yang terjadi pada bahasa-bahasa lain di Timur Tengah, namun malah menjadi bahasa pertama yang dapat mendobrak dominasi bahasa Arab dalam budaya Islam. Kebanyakan karya tulis Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Persia sebelum diterjemahkan lagi ke bahasa-bahasa lain, dan literatur orisinal Persia juga berkembang pesat; *Shahnameh*, sebuah karya mengenai sejarah negara Iran yang ditulis Ferdowsi adalah salah satu contoh. Setelah budaya Arab meredup pada akhir Zaman Kejayaan Islam, Iran menjadi tempat perantara budaya Islam sebelum disebarkan ke Asia Tengah dan Asia Selatan; alhasil, bahasa Persia menjadi bahasa kelas atas di daerah sana, paling tidak sampai Bangsa Turk mulai mendominasi kawasan Asia Tengah dan Eropa, dan mereka sekalipun juga terpengaruh, ditunjukkan oleh bahasa Turki Utsmaniyah, di mana setengah dari kosakatanya adalah kata serapan dari bahasa Persia.

Iran juga banyak melahirkan karya kesusasteraan yang hebat. Banyak sastrawan dunia yang lahir dari Iran, diantaranya ialah Rumi, dan Saadi. Mereka merupakan ahli Sufi, dan telah banyak menyumbang dalam puisi-puisi Sufi.

Dari catatan sejarah, peradaban Iran yang pertama ialah Proto-Iran, diikuti dengan peradaban Elam. Pada milenium kedua, dan ketiga, Bangsa Arya hijrah ke Iran, dan mendirikan kekaisaran pertama Iran, Kekaisaran Media (728-550 SM). Kekaisaran ini telah menjadi simbol

pendiri bangsa, dan juga kekaisaran Iran, yang disusul dengan Kekaisaran Achaemenid (648–330 SM) yang didirikan oleh Cyrus Agung.

Cyrus Agung juga terkenal sebagai pemerintah pertama yang mewujudkan undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan, tertulis di atas artefak yang dikenal sebagai Silinder Cyrus. Ia juga merupakan pemerintah pertama yang memakai gelar Agung, dan juga Shah Iran.

Parsi mulai berganti menjadi Islam Syiah pada zaman Safawi, pada tahun 1501. Dinasti Safawi kemudian menjadi salah satu penguasa dunia yang utama, dan mulai mempromosikan industri pariwisata di Iran. Di bawah pemerintahannya, arsitektur Persia berkembang kembali, dan menyaksikan pembangunan monumen-monumen yang indah. Kejatuhan Safawi disusuli dengan Persia yang menjadi sebuah medan persaingan antara kekuasaan Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Britania (yang menggunakan pengaruh Dinasti Qajar. Namun begitu, Iran tetap melestarikan kemerdekaan, dan wilayah-wilayahnya, menjadikannya unik di rantau itu.

Modernisasi Iran yang bermula pada lewat abad ke-19, membangkitkan keinginan untuk berubah dari orang-orang Persia. Ini menyebabkan terjadinya Revolusi Konstitusi Persia pada tahun 1905 hingga 1911. Pada tahun 1921, Reza Khan (juga dikenal sebagai Reza Shah) mengambil alih tahta melalui perebutan kekuasaan dari Qajar yang semakin lemah. Sebagai penyokong modernisasi, Shah Reza memulai pembangunan industri modern, jalan kereta api, dan pendirian sistem pendidikan tinggi di Iran. Malangnya, sikap aristokratik, dan ketidakseimbangan pemulihan kemasyarakatan menyebabkan banyak rakyat Iran tidak puas.

Pada Perang Dunia II, tentara Inggris, dan Uni Soviet menyerang Iran dari 25 Agustus hingga 17 September 1941, untuk membatasi Blok Poros, dan mengagah infrastruktur

penggalan minyak Iran. Blok Sekutu memaksa Shah untuk melantik anaknya, Mohammad Reza Pahlavi menggantikannya, dengan harapan Mohammad Reza menyokong mereka.

Malangnya, pemerintahan Shah Mohammad Reza bersifat otokratis. Dengan bantuan dari Amerika, dan Inggris, Shah meneruskan modernisasi Industri Iran, tetapi pada masa yang sama menghancurkan partai-partai oposisi melalui badan intelijennya, SAVAK. Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi oposisi, dan pengkritik aktif terhadap pemerintahan Shah Mohammad Reza, dan kemudian ia dipenjarakan selama delapan belas bulan. Melalui nasihat jenderal Hassan Pakravan, Khomeini dibuang ke luar negeri, dan diantar ke Turki, dan selepas itu ke Irak.

Menjelang 1979, protes menentang Shah semakin meningkat, hingga akhirnya terjadilah Revolusi Iran. Shah Iran terpaksa melarikan diri ke negara lain setelah kembalinya Imam Khomeini dari pembuangan pada 1 Februari 1979. Khomeini kemudian mengambil alih kekuasaan, dan membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri. Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibentuk berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan sebagian.

Revolusi menyebabkan beberapa perubahan signifikan pada pemerintahan Iran. Hubungan dengan Amerika Serikat yang sebelumnya dekat menjadi keruh setelah revolusi ini, terutama saat mahasiswa-mahasiswa Iran menawan kedutaan Amerika pada 4 November 1979, atas alasan kedutaan itu menjadi pusat intelijen Amerika. Khomeini tidak mengambil tindakan apapun mengenai tindakan ini sebaliknya memuji mahasiswa-mahasiswa itu. Sebagai balasan, Iran menginginkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dikembalikan ke Iran, tetapi ini tidak mereka

setujui. Setelah 444 hari di dalam tawanan, akhirnya para tawanan itu dibebaskan sebagai tindak lanjut Deklarasi Aljir.

Pada saat yang sama, Saddam Hussein, presiden Irak saat itu, mengambil kesempatan di atas kesempatan setelah revolusi Iran, dan juga kekurangan popularitas Iran di negara-negara barat, untuk melancarkan perang atas Iran. Tujuan utama peperangan ini ialah menaklukkan beberapa wilayah yang dituntut Irak, terutamanya wilayah Khuzestan yang kaya dengan sumber minyak. Saddam pula ketika itu mendapat sokongan dari Amerika, Uni Soviet, dan beberapa negara Arab lain. Tentara Iran pula yang suatu masa dahulu merupakan sebuah tentara yang kuat, telah dibubarkan saat itu. Walau bagaimanapun, mereka berhasil mencegah bahaya tentara Irak seterusnya menaklukkan kembali wilayah Iran yang ditaklukkan Irak. Dalam peperangan ini puluhan ribu nyawa, baik penduduk awam maupun laskar Iran, menjadi korban. Jumlah korban diperkirakan antara 500.000 hingga 1.000.000.

Kebanyakan industri Iran bertumpu di kota ini. Di antaranya ialah industri otomobil, elektronik, dan listrik, pembuatan senjata api, tekstil, dan industri kimia. Berikut adalah 8 kota terbesar Iran beserta jumlah penduduknya.

Ekonomi Iran adalah campuran Ekonomi Perencanaan Sentral dengan sumber minyak, dan perusahaan-perusahaan utamanya dimiliki pemerintahan, dan juga terdapat beberapa perusahaan swasta. Pertumbuhan ekonomi Iran stabil semenjak dua abad yang lalu.

Pada awal abad ke-21, kontribusi sektor jasa dalam pengeluaran negara adalah yang tertinggi, diikuti dengan pertambangan, dan pertanian. 45% belanja negara adalah hasil pertambangan minyak, dan gas alam, dan 31% dari cukai. Pada 2004, PNK Iran diperkirakan sebanyak \$163 miliar atau \$2.440 per kapita.

Rekan dagang Iran adalah Cina, Rusia, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara itu, semenjak lewat 90-an, Iran mulai meningkatkan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara berkembang termasuk Suriah, India, dan Afrika Selatan.

Jaringan jalan raya di Iran adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan menghubungkan kota-kota utama, dan kawasan-kawasan luar kota. Pada 2002, Iran mempunyai 178.152 km jalan raya, dan 66% beraspal. Sementara itu terdapat 30 pengguna kereta bagi setiap 1000 penduduknya. Jalan KA di Iran sepanjang 6.405 km (3.980 mil). Pelabuhan utama Iran ialah pelabuhan Bandar Abbas yang terletak di Selat Hormuz. Pelabuhan ini dihubungkan dengan sistem jalan raya, dan jalan kereta api untuk pengangkutan kargo. Jaringan kereta api Tehran-Bandar Abbas dibangun pada 1995 yang menghubungkan Bandar Abbas dengan seluruh Iran, dan Asia Tengah melewati Teheran, dan Masyhad. Pelabuhan-pelabuhan lain ialah pelabuhan Bandar Anzali di Laut Kaspia, pelabuhan Bandar Turkmen juga berhadapan dengan Laut Kaspia, dan pelabuhan korramshahr, dan pelabuhan Bandar Khomeyni di Teluk Parsi. Kota-kota utama di Iran juga dihubungkan dengan Pengangkutan Udara. Iran Air adalah maskapai penerbangan kebangsaan Iran yang bertanggungjawab dalam pengangkutan udara di Iran, dan luar Iran. Sistem transit pula terdapat di semua bandar-bandar utama sedangkan Teheran, Masyhad, Syiraz, Tabriz, Ahwaz, dan Isfahan sedang dalam proses membangun jalan kereta api bawah tanah.

1. Militer Iran

Militer Iran terbagi atas dua pasukan yaitu pasukan militer negara, dan pasukan militer revolusi. Pasukan militer revolusi berjumlah 545.000 jiwa. Kedua-dua pasukan bersenjata ini dibawah kendali Menteri Pertahanan, dan Logistik Pasukan Bersenjata Iran.

Tentara nasional Iran mempunyai 420.000 prajurit yang terbagi atas tiga angkatan utama yaitu Angkatan Darat Iran sebanyak 350.000 pasukan, Angkatan Laut Iran sebanyak 18.000 pasukan, dan Angkatan Udara Iran sebanyak 52.000 pasukan. Angkatan revolusi mempunyai 125.000 pegawai yang terbagi atas lima cabang yaitu Pasukan Qods (pasukan khusus), Basij (paramiliter), Angkatan Laut Revolusi, Angkatan Udara Revolusi, dan Angkatan Darat Revolusi.

Angkatan Basij adalah tentara paramiliter yang mempunyai anggota penuh 90.000 prajurit, dan juga 30.000 prajurit cadangan ditambah dengan 11 juta pria, dan wanita yang dapat dimobilisasi.

Kekuatan tentara Iran dirahasiakan dari pengetahuan umum. Namun, pada beberapa tahun terakhir, Iran mengumumkan pembangunan beberapa senjata seperti peluru kendali Fajr-3, peluru kendali Kowsar, peluru kendali Fateh-110, peluru kendali Shahab-3, dan beberapa pembangunan jenera militer.

Peluru kendali Fajr-3 berada di antara pembangunan militer Iran yang paling canggih saat ini, yang dibuat di Iran sendiri, dan menggunakan bendalir minyak untuk pembakaran bahan api. Julat peluru kendali ini dirahasiakan.

C. Dinamika Hubungan Arab Saudi dengan Iran

1. Dinamika Hubungan Arab Saudi dan Iran Sebelum Arab Spring

Arab Saudi mempunyai hubungan bilateral yang cukup rumit dengan Iran. Meskipun dua negara ini merupakan negara Islam, namun hubungan keduanya banyak dibangun dari ketegangan dan konflik. Pemerintah Riyadh berbenturan kepentingan dengan Teheran dalam

banyak isu mulai geo-politik, politik minyak, sikap terhadap Amerika Serikat dan Barat, serta ambisi atas tongkat kepemimpinan Islam.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, Arab Saudi merupakan negara monarki absolut yang menganut Sunni sebagai aliran resmi negara. Sedangkan Iran merupakan negara mayoritas Syiah dengan bentuk Republik Presidensial Islam yang menjadikan isu revolusi islam sebagai salah satu kampanye utamanya. Saudi membangun hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan Barat sedangkan Iran pasca revolusi konsisten membangun isu anti-barat. Iran bahkan menuding Arab Saudi sebagai antek barat yang menjadi penjaga kepentingan barat di kawasan.

Perbedaan aspirasi dan sikap tersebut menempatkan keduanya dalam rivalitas yang cukup sengit. Berbagai perbedaan mendasar antara Saudi dan Iran ini melahirkan ketegangan yang terjadi mulai dari perang kata-kata antara elit pimpinan kedua negara, sampai perang proksi di negara-negara dimana terdapat perbedaan kepentingan keduanya. Gambaran ketegangan keduanya tampak jelas dalam pernyataan keras Raja Abdullah yang mengatakan bahwa di dunia ini ada dua negara yang tak layak eksis, yaitu Iran dan Israel. Pernyataan tersebut dikatakan Raja Abdullah kepada Harve Morin, Mantan Menteri Pertahanan Perancis. Mantan pemimpin tertinggi kerajaan Saudi tersebut juga di sebut sempat mendesak Amerika Serikat untuk menyerang Iran dan menghentikan program senjata nuklirnya. Dengan nada sarkastis, Abdullah menyebut Iran merupakan kepala ular yang mesti dipotong.⁸

Dari pihak Iran, Ayatollah Khomeini, Bapak Revolusi negara tersebut pernah mengatakan dengan nada yang tak kalah keras bahwa Saudi merupakan pengkhianat kaum

⁸ ["Iran's Ahmadinejad dismisses Wikileaks cables release". BBC News. 29 November 2010.](http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11860435) Di akses pada 18 April 2016

muslim, berikut pernyataan lengkap Khomeini yang memicu pemutusan hubungan diplomatik kedua negara antara tahun 1987 sampai 1991:

*“...these vile and ungodly Wahhabis, are like daggers which have always pierced the heart of the "Muslims" from the back,” and announced that Mecca was in the hands of “a band of heretics.”*⁹

Ketika masih menjadi Presiden, Ahmadinejad juga pernah melontarkan sindiran keras yang ditujukan kepada Arab Saudi. Ahmadinejad mengatakan bahwa negara-negara barat melancarkan invasi ke Afghanistan dan Irak sebagai balasan atas peristiwa 11 September, padahal basis utama Al Qaeda ada di negara lain yang masih leluasa menikmati keuntungan luar biasa dari minyak dan mempunyai hubungan sangat erat dengan Amerika Serikat dan Negara Barat lain. Lebih lanjut, Ahmadinejad menegaskan bahwa negara tersebut sama sekali tak pernah melaksanakan pemilihan demokratis, melarang perempuan berkendara, tapi Amerika Serikat dan negara barat lain malah mendukung negara yang tak demokratis tersebut.¹⁰

Hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran dibangun pertama kali pada tahun 1928. Pada tahun 1966, pemimpin Saudi saat itu, Raja Faisal, melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Kunjungan tersebut segera dibalas oleh Shah Iran yang sekaligus melahirkan resolusi damai atas kasus perselisihan pulau Farsi dan Arabi. Kesepakatan tersebut menyerahkan pulau Farsi pada kedaulatan Iran dan memberikan kedaulatan penuh pada Arab Saudi atas Pulau Arabi.¹¹ Ketika Inggris menyatakan penarikan mundur pasukanya dari Teluk Persia pada tahun 1968, Saudi dan Iran mengambil langkah bersama untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut. Rentang waktu 1968 sampai 1979

⁹ [Khomeinis messengers in mecca](http://martinkramer.org/sandbox/reader/archives/khomeinis-messengers-in-mecca) Martin Kramer. <http://martinkramer.org/sandbox/reader/archives/khomeinis-messengers-in-mecca>. Diakses pada 18 April 2016

¹⁰ [Press TV Iran-Saudi Arabia come to blows over Yemen](http://www.presstv.com/detail.aspx?id=116192§ionid=351020101), 15 January 2010. <http://www.presstv.com/detail.aspx?id=116192§ionid=351020101>. Diakses pada 13 April 2016

¹¹ Kaven L. Afrasiab, "Saudi-Iran Tension Fuel Wider Conflict" Asia Times, 6 December 2006. http://www.atimes.com/atime/Middle_East/HLO6AKo4.html. Diakses pada 18 April 2016

merupakan masa terindah dalam riwayat hubungan kedua negara dimana Riyadh cenderung mempunyai hubungan yang harmonis dengan Teheran.

Memasuki era 70an hubungan Saudi dan Iran mulai menghangat. Kebijakan modernisasi militer Iran yang semakin menambah kekuatan negara tersebut menghadirkan kekhawatiran di pihak Saudi. Dengan kekuatan militer barunya, Iran mempunyai potensi untuk mendominasi kawasan, hal tersebut tentu menjadi kabar buruk bagi Saudi. Setelah Iran memasuki masa Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, praktis hubungan Arab Saudi dan Iran banyak diwarnai dengan ketegangan dan konflik. Pasca revolusi, Iran mengalami banyak perubahan fundamental, perubahan yang turut berimbas pada pendekatan kebijakan luar negeri.

Perubahan ini memicu kekhawatiran pihak Saudi. Setidaknya ada dua hal yang memicu kekhawatiran Saudi. Pertama, ambisi Ayatollah Khomeini untuk menyebarluaskan semangat revolusi islamnya ke negara-negara kawasan; Yang kedua, sikap Iran yang secara frontal anti-Amerika Serikat dan Barat. Dua hal yang ini memicu kemarahan pihak Riyadh lantaran Saudi merupakan negara monarki absolut yang jelas menjadi salah satu sasaran kampanye ekspor revolusi Iran, dan Amerika merupakan salah satu sekutu terdekat sekaligus pelindung kepentingan Arab Saudi, terutama terkait isu-isu seputar kawasan.

Saat terjadi perang Iran-Iraq pada tahun 1980an, Arab Saudi menjadi penyokong utama pihak Iraq. Pemerintah Saudi mengucurkan tak kurang dari 25 juta USD untuk membantu pemerintah Saddam Husein menghadapi Iran. Sejatinya Arab Saudi mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Partai Baath yang saat itu merupakan partai penguasa di Iraq, Saudi memilih untuk mengabaikan hal tersebut namun demi membendung Iran. Saudi bahkan mendorong negara-negara teluk lainnya, termasuk Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, untuk ikut

membantu mengucurkan dana bagi Iraq juga.¹² Periode ini menjadi babak baru hubungan Arab Saudi Iran dimana Saudi melihat Iran sebagai ancaman serius terhadap kepentingan nasional dan stabilitas di kawasan.

2. Dinamika Hubungan Arab Saudi-Iran Pasca Arab Spring

Musim Semi Arab telah membawa banyak perubahan di Timur Tengah. Kejatuhan rezim di beberapa negara yang di landa Arab Spring menghadirkan peta politik baru yang mengundang perhatian khusus dari Arab Saudi dan Iran. Sebagai dua negara berpengaruh di kawasan tersebut, Saudi dan Iran ikut terusik dengan pergolakan yang terjadi selama Arab Spring. Perubahan konfigurasi politik di negara-negara yang dilanda Arab Spring turut berimbas pada kepentingan dua negara tersebut dalam mengejar prioritas kebijakan luar negeri mereka di kawasan. Sebagaimana disampaikan di bab sebelumnya, Arab Saudi dan Iran senantiasa bersaing memperebutkan pengaruhnya di kawasan. Perubahan besar yang dilahirkan gelombang Arab Spring ini membenghadirkan celah baru bagi kedua negara berpengaruh ini untuk memperbesar pengaruh mereka.

Atas dinamika politik baru yang berkembang dikawasan ini, Saudi dan Iran tak tinggal diam. Mereka banyak melakukan “investasi” di negara-negara yang tengah bergejolak. Ada pola yang menarik ketika kita mengkaji rivalitas keduanya di kawasan pasca musim semi Arab ini, yaitu Arab Saudi cenderung berada di pihak yang mempertahankan status quo, sedangkan Iran mendukung kelompok penantang.¹⁹³ Arab Saudi melihat kejatuhan rezim penguasa di Mesir , Tunisia, dan Yaman dengan kekhawatiran, sementara pemimpin Iran melihat peristiwa tersebut dengan antusias, mereka menyambut baik perubahan rezim ini sebagai peluang untuk

¹² Wikipedia

penyebaran pesan revolusioner Islam yang tengah menemukan momentumnya untuk merekah. Iran melihat pergolakan politik yang terjadi ini sebagai kekalahan bagi AS dan kebangkitan gerakan Islam yang membebaskan di Timur Tengah.

Konsolidasi demokrasi pasca Arab Spring tak selalu berjalan mulus, di beberapa negara bahkan justru terjadi pergolakan yang tak kunjung usai. Ketidakpuasan akan rezim baru ataupun proses transisi yang berlangsung melahirkan pemberontakan yang menyebar luas. Di Suriah dan Yaman, bahkan muncul pemberontakan bersenjata yang berujung pada perang sipil yang berkepanjangan, pemberontakan menyebar di hampir seluruh wilayah. Arab Saudi dan Iran yang terlibat dalam rivalitas untuk memperebutkan pengaruh di kawasan turut mengambil kesempatan dari konflik yang terjadi di negara-negara yang lemah tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan pengaruh politik mereka. Arab Saudi dan Iran tidak hanya terlibat dalam perang proksi satu sama lain, kini mereka bahkan melakukan intervensi militer langsung, salah satunya di Yaman.

Di Suriah, rezim Bashar al-Assad berdiri kokoh dengan sokongan Iran. Majalah *the Economist* edisi Januari 2015 menyatakan, Iran tak hanya membantu dengan bahan bakar dan senjata, tetapi juga ratusan penasihat dari Pasukan Garda Revolusi Iran serta ribuan milisi Syiah yang dilatih Iran di Lebanon dan Irak. Sebaliknya, Saudi dan negara-negara Arab lainnya terus mendukung perjuangan kelompok oposisi yang ingin menumbangkan rezim al-Assad sejak dimulainya Arab Spring.

Di Irak, Menteri Pertahanan Khalid al-Obaidi menyatakan, Iran berperan penting melawan ISIS di Irak. Pemerintah Irak yang sebelumnya kewalahan melawan ISIS, dengan bantuan milisi Syiah yang dilatih Iran, akhirnya bisa merebut kembali beberapa kota seperti

Amerli, Baiji, dan Erbil di wilayah Kurdi. Saudi juga memulihkan hubungan dengan Irak untuk mengimbangi pengaruh Iran. Saudi merencanakan membuka kembali kedutaannya di Baghdad dan konsulat di Erbil, setelah 25 tahun putusnya hubungan diplomatik keduanya.

Di Yaman, Saudi memimpin Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk mendukung kepemimpinan Presiden Mansour Hadi yang terus dirongrong milisi al-Houthi yang didukung Iran. Ketika Presiden Mansour Hadi melarikan diri dari pengepungan al-Houthi di Sanaa dan menjalankan roda pemerintahan di Kota Aden, Yaman selatan, negara-negara GCC pun memindahkan kedutaannya dari Sanaa ke Aden.

Demi terus mempertahankan Pemerintah Hadi, Saudi pun memimpin koalisi untuk serangan udara terhadap milisi Houthi yang juga mulai menguasai Aden dan berusaha merebut Yaman secara keseluruhan. Setelah pendudukan Sanaa, al-Houthi dan Iran justru meneken perjanjian pembukaan penerbangan langsung kedua negara.